



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BEBANDEM TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BEBANDEM

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan BPD yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu untuk menetapkan besaran tunjangan BPD Desa Bebandem dengan menetapkan dalam Keputusan Perbekel.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 200 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan yang Saha Bagi Perbekel, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah kabupaten karangasem tahun 2019 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
14. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);

15. Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 - 2026 Lembaran Desa Bebandem Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Bebandem Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Bebandem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 8);
18. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Perbekel Tentang Besaran Tunjangan BPD Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Tahun 2024;
- Kedua : Besaran Tunjangan adalah sebagaimana dalam daftar terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Tunjangan yang diberikan bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem

Pada tanggal 2 Januari 2024.

PERBEKEL BEBANDEM,

IGEDD PARTADANA



Lampiran I

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 29 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Penetapan Besaran Tunjangan BPD Desa Bebandem,

Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Tahun 2024.

No	Jabatan	Tunjangan Kinerja (Rp)	Ket.
1.	Ketua BPD	1.000.000	Setiap Bulan
2.	Wakil Ketua BPD	900.000	Setiap Bulan
3.	Sekretaris	900.000	Setiap Bulan
4.	Anggota BPD	800.000	Setiap bulan

Perbekel Bebandem,

I GEDE PARTADANA